

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau *literature review* berisi mengenai teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan untuk keaslian penelitian, untuk tinjauan pustaka dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Teori Agency

Teori keagenan (*Agency Theory*) dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini muncul ketika ada hubungan kontrak kerja sama antara manajer dan pemegang saham yang digambarkan sebagai hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan (Imanta, 2011). Teori ini mengasumsikan secara tidak langsung akan terjadinya perbedaan kepentingan diantara *principal* dan *agent*. *Principal* menginginkan dividen dan keuntungan dari investasinya, sedangkan *agent* lebih menginginkan kompensasi keuangan berupa bonus, insentif, kenaikan gaji, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya (Elqorni, 2009 dalam Adnantara, 2013).

Perbedaan kepentingan ini akan menyebabkan biaya agensi, menurut Jansen dan Meckeling biaya agensi terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi segala perilaku agen dalam rangka mengelolah perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak melakukan tindakan yang merugikan *principal*.

Perbedaan yang ada tidak lepas dari kenyataan jika manajemen berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan tanpa memperhatikan kepentingan *stakeholders* nya. Perbedaan kepentingan seperti ini yang dapat diatasi dengan adanya struktur kepemilikan. Karena adanya kontrol yang dimiliki oleh *principal* dipercaya dapat mempengaruhi jalannya perusahaan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap CSR dalam suatu perusahaan, Rawi dalam (Adnantara, 2013).

2.1.2 Teori Stakeholders

Teori ini mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. *Stakeholder* sendiri seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, dan masyarakat. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, ketika

stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang dapat memuaskan keinginan *stakeholder* (Anis, 2007). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Pada dasarnya teori *stakeholder* berkaitan dengan cara-cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola *stakeholdernya*, cara-cara tersebut tergantung bagaimana perusahaan dalam mengendalikan setiap *stakeholdernya*. CSR dapat mengelolah perubahan pada tingkat perusahaan dengan cara bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang dapat dilihat dari dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal merupakan praktek pertanggungjawaban sosial yang difokuskan pada hubungan dengan karyawan, seperti modal berupa manusia, kesehatan dan keselamatan dan perubahan manajemen. Sedangkan dimensi eksternal merupakan kegaitan pertanggungjawaban sosial yang difokuskan diluar perusahaan, seperti kegaitan dengan masyarakat setempat dengan melibatkan berbagai *stakeholder* yang ada dan pertanggung jawaban terkait dengan lingkungan pengolahan sumber daya alam dan penggunaannya dalam produksi, Harizan dalam (Purwandaka, 2012).

Stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai bagaimana aktivitas operasi dalam lingkungan sekitar perusahaan. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholdernya* maka besar kemungkinan akan menuai protes. Maka perlu di perhatikan bahwa CSR yang

dilakukan oleh perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi hak pada *stakeholder*.

2.1.3 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Darwin, 2004 dalam Rawi, 2008). Untung (2008) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan di dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Ketentuan mengenai kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan atau penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan dengan lingkungan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya (Wahyudi dan Azheri, 2008).

Menurut Porter dalam Purwandaka (2012) menyatakan jika CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari dengan tiga prinsip yang lebih dikenal dengan *triple bottom line* yang terdiri dari *profit*, *people*, dan *planet*. Adapun definisi ketiga prinsip tersebut sebagai berikut:

1. *Profit*, dalam hal ini perusahaan harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.
3. *Planet*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati.

Ruang lingkup CSR dibedakan menjadi dua, pertama yaitu *basic responsibility* yaitu untuk memenuhi kepentingan para *stakeholder*, dan yang kedua yaitu *social responsibility* yang merupakan tanggung jawab yang menjelaskan tahapan interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, Murwaningsari dalam (Purwandaka, 2012).

2.1.3.1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sebelum membuat keputusan berinvestasi di dalam suatu perusahaan, biasanya investor melihat apakah perusahaan mengungkapkan tanggungjawab sosialnya kepada publik, hal ini digunakan untuk melihat apakah perusahaan memiliki prospek untuk terciptanya sustainability development. Hal ini bisa

menjadi point tambahan bagi perusahaan yang telah mengungkapkan CSR. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang penting untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, Suwardjono dalam (Tamba, 2011).

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diakomodasi dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 tentang penyajian laporan keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana faktorfaktor lingkungan hidup memegang peranan penting. Pengungkapan CSR dapat dituangkan bersama dengan laporan tahunan perusahaan atau disajikan tersendiri di dalam *sustainability report*. *Global Reporting Initiative* mendefinisikan *sustainability report* merupakan praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggungjawab kepada seluruh *stakeholders* mengenai seluruh kinerja organisasi dalam mewujudkan terciptanya *sustainability report*.

Adapun tujuan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan adalah sebagai berikut (Rosmasinta, 2007):

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak social ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.

3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

Informasi yang dimuat dalam laporan tahunan ada dua jenis. Yang pertama adalah laporan tahunan dengan pengungkapan wajib yaitu pengungkapan wajib yaitu pengungkapan informasi yang wajib diberitahukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bapepam No. : Kep38/PM/1996 tgl 17 Januari 1996. Jenis yang kedua adalah laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan informasi diluar pengungkapan wajib yang diberikan dengan sukarela oleh perusahaan para pemakai (Yulianto dan Chariri, 2003 dalam Mahdiyah, 2008). Salah satu bagian dari pengungkapan sukarela yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996 dalam Mahdiyah 2008) diartikan sebagai suatu proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005 dalam Mahdiyah, 2008).

2.1.3.2 Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tujuan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat membagi kegiatan sesuai dengan norma, moral dan etika sehingga dapat menciptakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya.

2. Perusahaan dapat menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan benar mengenai produk yang dihasilkan. Pada perusahaan manufaktur, CSR memberikan informasi mengenai komposisi, manfaat, tanggal kadaluarsa produk, cara penggunaan yang tepat, kualitas, mutu, efek samping dan harga dalam kemasan produk untuk memungkinkan konsumen dapat mengambil keputusan yang rasional apakah ingin menggunakan produk tersebut atau tidak.
3. Perusahaan dapat memperhatikan hasil produk buatan mereka, serta perusahaan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan konsumen ketika mereka menggunakan produk tersebut karena perusahaan mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang besar atas keselamatan dan keamanan para konsumennya.

2.1.3.3 Indeks Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI). Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu dengan menilai setiap item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dan laporan berkelanjutan. Dalam standar GRI (GRI, 2006), indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu, ekonomi, lingkungan dan sosial yang menyangkut hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator mencapai 79 indikator yang terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator

lingkungan hidup, 14 indikator praktik tenaga kerja, 9 indikator hak asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan dan 9 indikator tanggung jawab produk.

Masing-masing kategori tersebut dinilai 1 jika diungkapkan dan dinilai 0 jika tidak diungkapkan. Kemudian nilai dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh besarnya nilai CSR secara keseluruhan dari suatu perusahaan dan dibandingkan dengan pedoman standar pelaporan GRI G4 perkategori masing-masing. Sehingga diperoleh CSR untuk kategori kinerja ekonomi, CSR untuk kinerja lingkungan dan CSR untuk kinerja sosial.

Jadi dalam luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI minimal yang harus ada antara lain:

1. Indikator Ekonomi

Indikator Ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingan dan terhadap sistem ekonomi di tingkat local, nasional dan global. Kategori ekonomi menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan program CSR dengan konsekuensi biaya yang didasarkan pada bentuk rasionalitas perusahaan untuk menaikkan nilai ekonomi sekaligus memaksimalkan utilitas yang diprosikan dengan kinerja keuangan yang berkorelasi positif.

2. Indikator Lingkungan

Indikator Lingkungan merupakan salah satu pengungkapan sukarela yang menjadi bagian dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam pelaporan tersebut menjelaskan program-program kinerja lingkungan selama periode waktu tertentu kemudian hasil laporan tersebut akan dilaporkan didalam *annual report*. Perusahaan dalam melakukan program kinerja lingkungan akan memperhitungkan mengenai biaya dan manfaat perusahaan. Didalam *Global Reporting Initiative (GRI)* dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input seperti energy dan air, dan output seperti emisi dan limbah. Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa.

3. Indikator Sosial

Indikator keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap system social dimana organisasi beroperasi (GRI G4, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari besarnya skor pengungkapan CSR dimensi social terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor dan stakeholder di Indonesia telah memperhatikan adanya pengungkapan CSR dimensi social didalam proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi dan dampaknya terhadap nilai perusahaan (Nur Oktamayuni, 2021).

4. Indikator Hak Asasi Manusia

Perusahaan harus selalu memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan perlu memerhatikan asas kesetaraan yang meliputi praktik investasi, praktik manajemen, penerapan prinsip non diskriminasi, praktik kedisiplinan, praktik keamanan dan hak-hak masyarakat adat (GRI G4, 2014). Berdasarkan GRI dimensi hak asasi manusia membahas sejauh mana proses telah diterapkan dan perubahan kemampuan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan menggunakan hak asasi mereka.

5. Indikator Masyarakat

Dalam hal identitas, hak masyarakat tersebut didasarkan pada kolektif dan individu. Hak mereka untuk dikonsultasikan secara bebas, sebelum, dan perolehan informasi (free, prior and informed) untuk mendapatkan persetujuan merupakan hak dasar yang secara tegas diakui dalam poin referensi di atas (GRI G4, 2014).

6. Indikator Tanggung Jawab atas Produk

Indikator Tanggung Jawab atas Produk berhubungan dengan produk dan jasa. Hal ini secara langsung mempengaruhi pemangku kepentingan dan secara khusus kepada para pelanggan (GRI G4, 2014). Perusahaan dalam praktik bisnisnya seharusnya berusaha untuk selalu mengembangkan produknya agar sesuai dengan permintaan pasar dan mendapat keuntungan. Perusahaan yang memiliki banyak pesaing harus selalu mengembangkan produknya agar lebih unggul dalam persaingan. Maka

dari itu penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi citra merek maka semakin tinggi pula citra perusahaan, sama halnya dengan kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap citra perusahaan.

2.1.4 Struktur Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah jumlah besarnya persentase/proporsi dari kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, dan kepemilikan asing dalam saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principals*).

Menurut Mei Yuniati dkk (2016), menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham.

2.1.4.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2010). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain:

pertama, mereka mewakili pemegang saham intitusi. Kedua, mereka adalah tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam RUPS. Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen dengan pemegang saham rawan untuk terjadinya masalah keagenan, sebab manajer dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, hal ini akan berlawanan dengan upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Rahmawati, 2008). Maka teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial (Tamba, 2011).

Kepemilikan Manajerial sendiri adalah presentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Elvina, 2016). Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan manajerial, secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajerial akan berusaha mengurangi resiko kehilangan kekayaannya. Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.4.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi

lainnya. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka merupakan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lain.

Menurut Wahyu Widarjo dalam Pujianti (2015), Struktur kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah dan institusi swasta. Adanya kepemilikan oleh investor akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Rahmawati, 2008).

Selain itu pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya terbatas dilakukan oleh pihak dalam perusahaan namun juga dapat dilakukan dari pihak eksternal perusahaan yaitu dengan adanya pengawasan melalui investor-investor institusional. Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, (Nurchahyo, 2010). Selain itu menurut Rahmawati (2008) pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh *blockholder*, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.4.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rahmawati, 2008).

Jika dilihat dari sudut pandang *stakeholder*, pengungkapan CSR merupakan alat yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. Menurut Angling dalam (Tamba 2011) apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan CSR. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Oleh sebab itu perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan luas. (Xiao et.al, 2004 dalam Tamba, 2011).

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing (Susanto, 1992 dalam Angling 2010) sebagai berikut:

1. Perusahaan asing mendapatkan peltihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin punya sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2.2 Tinjauan Empiris

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hazra Maulidra, Artikel Ilmiah, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2015.	Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI 2010-2012).	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan sampel.	Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian menyimpulkan: (1a) Kepemilikan saham manajerial (X_{1a}) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Corporate sosial responsibility (Y) dengan nilai signifikansi $0.502 > 0.05$ serta nilai β negatif, (1b) Kepemilikan saham institutional

				<p>(X_{1b}) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Corporate sosial responsibility (Y) dengan nilai signifikansi 0.563 > 0.05 serta nilai β positif, (1c) Kepemilikan saham asing</p> <p>(X_{1c}) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Corporate sosial responsibility (Y) dengan nilai signifikansi 0.544 > 0.05 serta nilai β negatif (2) leverage(X₂) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Corporate sosial responsibility (Y)</p>
--	--	--	--	---

				dengan nilai signifikansi $0,607 > 0,05$ serta nilai β negatif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa hipotesis pertama dan kedua ditolak.
2.	Erida Gabriella Handayani Tamba, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2011.	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Manufacturing Secondary Sectors</i> yang <i>Listing</i> di BEI tahun 2009).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling didapatkan sampel 45 perusahaan dengan sumber data berupa laporan tahunan perusahaan. Analisis data menggunakan <i>content analysis</i> , diolah dengan uji asumsi klasik, dan kemudian pengujian hipotesis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing yang hanya memiliki efek positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Di sisi lain, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen tidak memiliki efek positif dan tidak berpengaruh signifikan

			menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0.	terhadap pengungkapan CSR.
3.	Anisa Rahmadani Hanif, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.	Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4.	Ni Wayan	Pengaruh	Penelitian ini	Hasil penelitian

<p>Rustiarini, Jurnal, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2011.</p>	<p>Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility.</i></p>	<p>menggunakan <i>Corporate Social Responsibility Index</i> (CSRI) sebagai ukuran pengungkapan CSR, berdasarkan indikator dari peraturan Bapepam. Sampel penelitian ini adalah 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Bursa (BEI) pada tahun 2008.</p>	<p>menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, tetapi kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing dalam penelitian ini memiliki kepedulian terhadap pengungkapan CSR untuk membuat keputusan investasi.</p>
---	---	---	---

5.	Rena Asyirin Nur Ariani, Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, 2017.	Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Manufaktur (Sektor Industri Barang Konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Penelitian ini menggunakan data <i>time series</i> tahun 2011-2014 untuk laporan tahunan perusahaan data laporan yang didapat dari Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tujuan metode sampling diperoleh 26 perusahaan sebagai sampel yang memenuhi kriteria dan menghasilkan 104 persepsi selama 4 tahun.	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan asing memberikan pengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> . Sementara itu, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial.
6.	Acep Edison, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Jurusan Akuntansi,	Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis data yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata struktur kepemilikan asing,

	<p>Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, 2017.</p>	<p>Manajerial Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014).</p>	<p>yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat pengolahan data Eviews 8.0.</p>	<p>kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan pengungkapan CSR mengalami perubahan yang berbeda pada setiap perusahaannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial, struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, dan struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional,</p>
--	---	--	---	---

				kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
7.	Muhammad Rivandi, Jurnal Ilmu Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP, 2020.	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan <i>High Profile</i> di BEI.	Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi panel. Populasi penelitian adalah semua perusahaan ternama yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 perusahaan yang dipilih dengan metode <i>purposive sampling</i> .	hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
8.	Nur	Pengaruh	Penelitian ini	Hasil penelitian

	Oktamayuni Waaqi'ah, Skripsi, Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2019.</i>	menggunakan analisis regresi data panel dengan pemilihan model <i>Fixed Effect</i> .	menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2019 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Return On Equity (ROE)</i> .
9.	Cosmina Lelia Voinea, Cosmin Fratostiteanu, and Bas Romein, <i>European</i>	<i>The Influence of Governance and Ownership on CSR Practices in Romania.</i>	Penelitian ini menggunakan tiga kelompok yang semuanya harus terdiri dari jumlah yang	Hasil penelitian ini memungkinkan korporat dan publik untuk merumuskan

	<p><i>Journal of Sustainable Development, Faculty of Economics and Business Administration, University of Craiova, Romania, 2019.</i></p>		<p>cukup dengan jumlah responden. Aturan praktisnya adalah ukuran sampel setidaknya harus 20 responden per kelompok untuk memastikan analisis yang memadai dan ukuran kelompok yang sama.</p>	<p>pendapat yang kuat tentang cara tertentu organisasi menjalankan bisnis mereka di Rumania mengenai CSR di mana praktik CSR mencerminkan budaya dan sebagian wilayah dan kepemilikan tertentu. Praktik CSR yang diterapkan di Rumania mungkin tidak selalu mencerminkan pandangan masyarakat melainkan pandangan kepemilikan publik/ pemerintah, pada apa yang dianggap</p>
--	---	--	---	--

				penting.
10.	Ni Putu Yuni Kusuma Dewi, dan Ni Gusti Putu Wirawati, <i>American Journal of Humanities and Social Sciences Research</i> (AJHSSR), <i>Faculty of Economics and Business, Udayana University</i> , 2021.	<i>The Influence of Share Ownership Structure and Company Size on Corporate Social Responsibility Disclosures.</i>	Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i> sebanyak 49 perusahaan, dengan jumlah pengamatan untuk jangka waktu 3 tahun sebanyak 147 pengamatan dan dianalisis dengan regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR di bidang manufaktur perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dari penelitian ini maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kepemilikan manajerial yaitu investor yang juga sebagai pemilik perusahaan memiliki tugas serta wewenang dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan (dewan komisaris dan dewan direksi) (Rivandi, 2018). Kepemilikan Manajerial yaitu besarnya persentase nilai saham yang ada pada pihak manajemen di bagi dengan total saham yang beredar. Pengukuran skala rasio digunakan dalam variabel ini dan kepemilikan manajerial dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh total modal saham yang beredar (Agustia, 2013). Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer sebagai investor dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Karima, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karima (2014), Priantana & Yustian (2011) dan Rawi (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Karena semakin besar kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial.

Hal ini juga disampaikan oleh Rosmasita (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan

CSR di Indonesia. Kepemilikan manajerial menyebabkan berkurangnya tindakan oportunistis manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya untuk meningkatkan image perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumberdaya untuk aktivitas tersebut (Anggraini, 2006).

Menurut teori dan hasil penelitian bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin banyak pengungkapan CSR yang akan dilakukan. Berarti bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen tersebut akan ikut serta aktif dalam pengambilan berbagai keputusan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.

2. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan institusi lainnya. Pemegang saham institusional juga memiliki *opportunity*, *resources*, dan *expertise* untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan (Agustia, 2013). Menurut Karima (2014)

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan membentuk suatu usaha pengawasan yang lebih besar dari pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistic* manajer.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soliman et al. (2012), Nugroho & Yulianto (2015) dan Sari, Sutrisno & Sukoharsono (2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan besarnya kepemilikan institusional merupakan entitas perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain yang mempunyai kecenderungan untuk berinvestasi dalam rangka mendapatkan keuntungan, sehingga tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku oportunistis manajer tidak dapat berjalan optimal.

Kepemilikan institusional yang memiliki presentase yang besar akan memberikan motivasi untuk lebih mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naila dan Wong Yong Oh (2016) menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka semakin besar juga tekanan terhadap manajer untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial walaupun penelitian tersebut terjadi di Korea untuk penelitian dari Wong Yong Oh

Menurut teori dan hasil penelitian terdahulu diperoleh bahwa makin besar kepemilikan saham institusional pada perusahaan maka tekanan terhadap pihak manajemen perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial pun

semakin besar. Institusi seperti pemerintah merupakan salah satu instansi yang kuat dalam membuat kebijakan terkait CSR yang mengawasi manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan CSR secara lebih baik.

Hasil pengujian statistik menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Waddock dan Graves (1994), Coffey dan Fryxell (1991), serta Turban dan Greening (1997) dalam Anggraini (2011). Hal ini berarti bahwa pemilik saham institusional yang memiliki rata-rata kepemilikan saham sebesar 66,81%, mampu mempengaruhi manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, dan pemilik saham institusional semakin menyadari pentingnya CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Berdasarkan beberapa asumsi tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

3. Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarni, 2011). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial

perusahaan (Machmud dan Djakman, 2008). Jika dilihat dari sisi *stakeholder* perusahaan, pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) (Puspitasari, 2009).

Tak bisa dipungkiri, kehadiran investasi asing dalam perusahaan-perusahaan Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan negara. Adanya investasi asing di dalam perusahaan dianggap sebagai salah satu hal yang menguntungkan perusahaan. Namun, nyatanya hingga saat ini investor asing yang ada di Indonesia hanya mengambil keuntungan dan kurang memberikan dampak yang cukup berarti bagi perekonomian.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Machmud dan Chaerul(2006) membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Jepang yang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan CSR. Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikanasing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholdernya yang biasanya berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya.

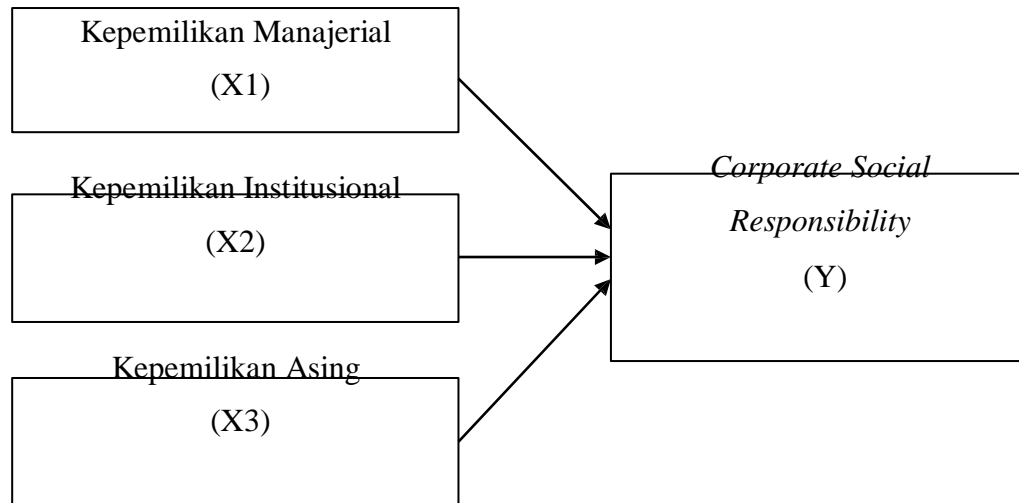
Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan CSR (Barkemeyer, 2007 dalam penelitian Rustiarini, 2010).

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan geografis dan bahasa. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Huafang dan Jianguo, 2007 dalam Rustiarini, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosur*.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Keterangan Kerangka Penelitian :

Y : Variabel Dependen *Corporate Social Responsibility* (CSR)

X1 : Variabel Independen Kepemilikan Manajerial

X2 : Variabel Independen Kepemilikan Institusional

X3 : Variabel Independen Kepemilikan Asing

